

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk mendorong serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Tentu untuk mengejar ketertinggalan tersebut di butuhkan pembiayaan yang cukup besar (Iswandi, 2017).

Menurut Syaikhuddin (2017), investasi atau penanaman modal merupakan salah satu pilar pokok dan faktor krusial dalam mencapai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan dalam produksi barang dan jasa di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan terciptanya kegiatan-kegiatan produksi tersebut akan mendorong terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan permintaan di pasar.

Investasi tidak hanya untuk berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pemerataan baik pemerataan antar daerah, pemerataan antar sektor, antar penduduk maupun masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang satu dengan yang lain (Nugroho, 2008).

Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara atau daerah. Investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Investasi atau penanaman modal akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang di produksi sehingga meningkatkan jumlah output nasional. Peningkatan output nasional akan menghasilkan laju pertumbuhan

ekonomi yang naik baik dari sisi angka persentasenya maupun dari sisi kualitasnya (Faisal dan Hasris, 2009 dalam J.j Sarungu, 2013).

Urgensi pembentukan modal di daerah mendapat perhatian dan penekan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peran penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah dimana dilakukan investasi. Investasi tersebut akan menyebabkan terbentuknya modal di daerah (Sutawijaya, 2013).

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dimana Kabupaten ini memiliki posisi yang cukup strategis yaitu berada pada jalur yang menghubungkan dua provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Dengan keberadaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang cukup strategis menjadikan daerah ini memiliki peluang yang besar dalam perekonomian termasuk di dalamnya potensi untuk berinvestasi (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015).

Penelitian mengenai sektor potensial di Kabupaten Lima puluh Kota telah di teliti oleh beberapa dosen Universitas Andalas tahun 2017, dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sektor-sektor potensial yang dapat di kembangkan serta memberikan kontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Sektor-sektor potensial tersebut diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ besar dari 1 (1.52) yang artinya peranan sektor ini di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih besar dari peranan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Barat, sektor selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Ketiga sektor potensial tersebut telah berkontribusi besar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana sektor pertanian berkontribusi hampir 37% bagi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2011-2016 (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota). Menurut wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota (media berita daerah), Sektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pertanian gambir memiliki total produksi terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan total produksi mencapai 80% dari keseluruhan total produksi pertanian gambir Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperkuat oleh Dirjen Perkebunan Indonesia pada salah satu media yang menyebutkan bahwa 50% gambir dari dunia dipasok oleh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Banyaknya sektor-sektor potensial di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan daerah ini memiliki peluang investasi yang cukup menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Dari data nilai investasi yang dihimpun oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, investasi di daerah ini mengalami peningkatan dari tahun 2007-2016 yaitu sebesar Rp. 67,16 milyar rupiah menjadi Rp. 94,87 milyar rupiah. Walaupun mengalami kenaikan, investasi Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana investasi pada tahun 2010, 2013, 2014 dan 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kenaikan nilai investasi Kabupaten Lima Puluh Kota seharusnya memberikan dampak yang baik bagi daerah ini sendiri, dimana dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, kenaikan investasi kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya mampu untuk menarik investor asing. Nilai

investasi Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh investor dalam negeri (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, 2018).

Melihat kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh sebab itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan dana atau investasi baik dari pemerintah maupun swasta yang nantinya diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif.

Untuk menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi, pemerintah telah mengupayakan berbagai aturan mengenai investasi, diantaranya undang-undang No.1 tahun 1967, jo No.11 tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) dan undang-undang No.6 tahun 1968, jo No. 12 tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun pada tahun 2006, pemerintah mengajukan RUU tentang penanaman modal sehingga UU yang ada diganti menjadi UU no.25 tahun 2007 yang terdiri dari 14 bab dan 40 pasal, dimana UU ini memberikan keistimewaan tersendiri kepada investor dalam segala hal.

Menurut Rini (2015), PDRB merupakan cerminan daya beli masyarakat atau pasar. Semakin meningkat daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (dicerminkan oleh pendapatan nasional perkapita atau PDRB perkapita) maka akan semakin menarik investor baik dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sukirno, bahwa tingkat pendapatan yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, dengan pendapatan masyarakat yang tinggi akan memperbesar permintaan terhadap

barang-barang dan jasa-jasa. Kenaikan permintaan barang dan jasa akan meningkatkan keuntungan perusahaan dengan begitu akan mendorong dilakukannya investasi.

Menurut Boediono (2005), apabila PDRB yang dimiliki suatu daerah tinggi maka akan menarik investor untuk berinvestasi. Dengan demikian jika PDRB yang suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan investasi di daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara PDRB dengan investasi.

Inflasi merupakan kondisi dimana naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2002 dalam Sepriyanti, 2015). Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, pada akhirnya akan menghambat investasi baru. Sesuai dengan teori ekspansi permintaan agregat kasus klasik (Dornbusch, 2008 dalam Iswandi, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara inflasi dengan investasi yang artinya kenaikan inflasi akan menurunkan investasi dan penurunan inflasi akan menaikkan investasi.

Menurut Sukirno (2005) tenaga kerja mempengaruhi investasi, dimana jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja secara terus menerus. Faktor tenaga kerja akan mempengaruhi investasi melalui tenaga kerja yang produktif, karena jumlah tenaga kerja produktif yang besar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Kenaikan produktivitas akan

dapat mempengaruhi investasi. Investor akan cenderung tertarik menanamkan modalnya di tempat dengan produktivitas tinggi sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih besar.

Dari latar belakang tersebut di atas secara umum terjadi peningkatan investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun peningkatan investasi Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berfluktuasi dan belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan judul penelitian **“Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi dan Tenaga Kerja Terhadap Investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007-2016”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016.

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016.
3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak lainnya. Diharapkan dengan penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota serta dapat menjadi bahan untuk mengambil kebijakan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah investasi, PDRB, inflasi serta tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007-2016. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan di Kabupaten Lima Puluh kota.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesa yang terkait mengenai pengaruh PDRB, tingkat inflasi dan tenaga kerja terhadap investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data penelitian, variabel-variabel penelitian yang digunakan, metode analisa data, serta alat analisa dalam melakukan penelitian.

## BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum daerah dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2007-2016.

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab V, tidak hanya itu pada bab ini dijelaskan juga saran yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.